

BAB I

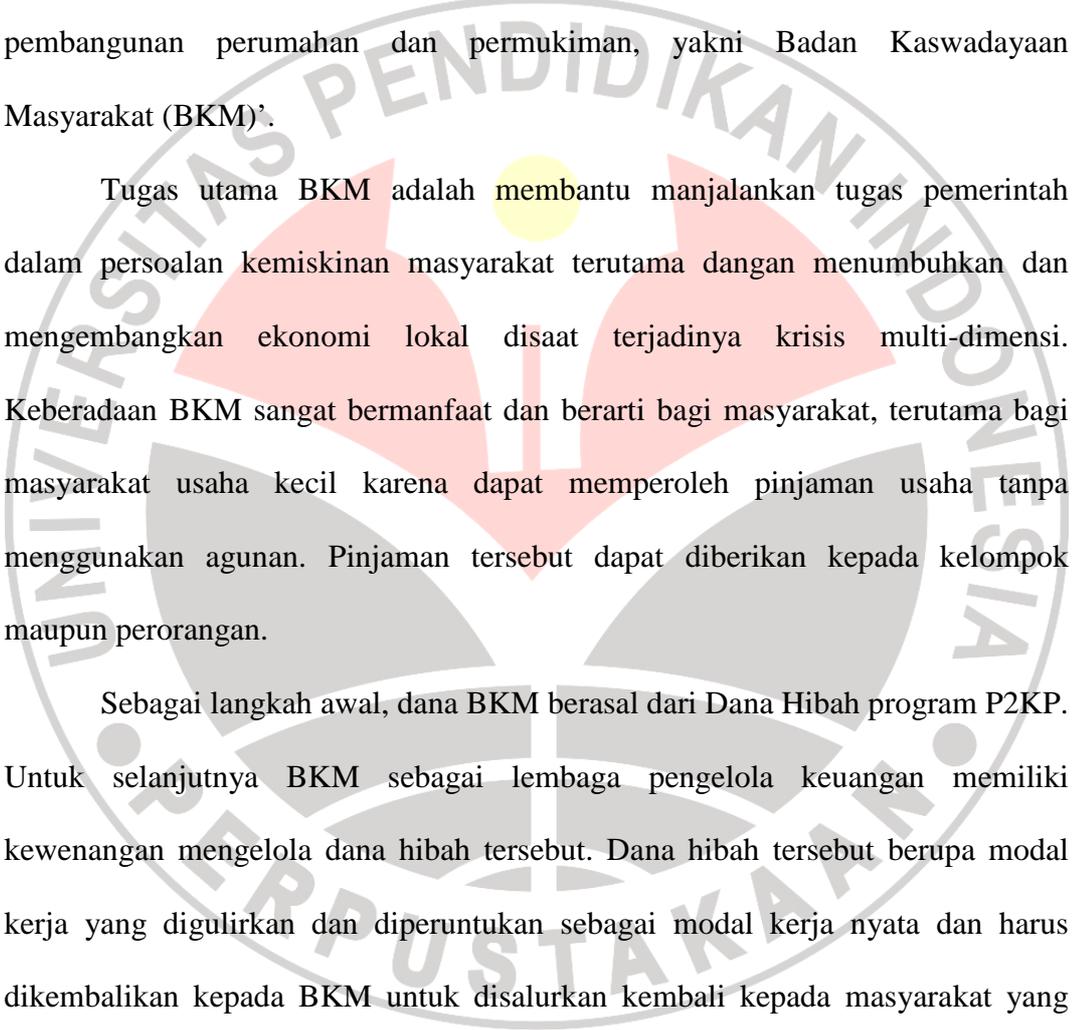
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah pembangunan multidimensi sehingga cara pemecahannya diperlukan suatu strategi komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan. Oleh karena itu pemerintah, dalam hal ini Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah telah merancang suatu program untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di perkotaan, dengan memberikan bantuan berupa program dana bergulir. Program-program bantuan dana bergulir itu jumlahnya cukup banyak satu diantaranya ialah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Dengan adanya program ini diharapkan akan terjadinya berbagai aktivitas yang mendorong berkembangnya perekonomian lokal. Pemerintah menggulirkan P2KP untuk pertama kalinya pada November 1999 dan berakhir November 2001. Ini adalah P2KP I tahap I, sedangkan P2KP I tahap II dimulai Agustus 2002 hingga Juli 2004.

Adapun tujuan dari P2KP yaitu:

Tujuan P2KP adalah memberikan bantuan teknis berupa pendampingan kepada masyarakat dalam rangka membantu pengorganisasian kelembagaan di tingkat komunitas dan melakukan upaya bagi peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi, perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian masyarakat dapat secara mandiri melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap berbagai program yang terkait dengan penyelesaian permasalahan serta penyebab kemiskinan yang dihadapi, dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. (Andri/Pikiran Rakyat : 2003).

Menurut Direktur Jendral Perumahan dan Pemukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Aca Sugandhy, dalam kata pengantar buku Pedoman Umum P2KP II, 'dari hasil pelaksanaan P2KP I Tahap I tampak perkembangan yang positif, khususnya dalam hal terwujudnya lembaga lokal masyarakat yang mandiri, yang termasuk di antaranya di dalam upaya pembangunan perumahan dan permukiman, yakni Badan Kaswadayaan Masyarakat (BKM)'.


Tugas utama BKM adalah membantu menjalankan tugas pemerintah dalam persoalan kemiskinan masyarakat terutama dengan menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi lokal disaat terjadinya krisis multi-dimensi. Keberadaan BKM sangat bermanfaat dan berarti bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat usaha kecil karena dapat memperoleh pinjaman usaha tanpa menggunakan agunan. Pinjaman tersebut dapat diberikan kepada kelompok maupun perorangan.

Sebagai langkah awal, dana BKM berasal dari Dana Hibah program P2KP. Untuk selanjutnya BKM sebagai lembaga pengelola keuangan memiliki kewenangan mengelola dana hibah tersebut. Dana hibah tersebut berupa modal kerja yang digulirkan dan diperuntukan sebagai modal kerja nyata dan harus dikembalikan kepada BKM untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

Terdapat 216 BKM yang ada di Kota dan Kabupaten Bandung, salah satunya adalah BKM Bina Dharma. Namun pada saat ini BKM yang ada di Kota

Bandung dan yang masih bertahan dan beroperasi tinggal enam BKM, termasuk didalamnya BKM Bina Dharma.

Meskipun BKM Bina Dharma merupakan salah satu BKM yang masih berdiri, namun BKM ini pun tidak terlepas dari masalah-masalah yang BKM lain hadapi.

Kendala yang dihadapi BKM saat ini adalah banyaknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang meminjam modal kerja sehingga dana yang ada tidak mencukupi untuk diberikan sebagai pinjaman, serta ada sejumlah masyarakat peminjam yang menganggap bahwa modal tersebut awalnya merupakan dana hibah jadi tidak perlu untuk dikembalikan.

Melihat fenomena yang terjadi berdasarkan laporan pertanggungjawaban pengurus BKM dari tahun 2001 sampai dengan 2007 dapat dilihat saldo piutang BKM Bina Dharma sebagai berikut:

Tabel 1.1
Saldo Piutang BKM Bina Dharma
Tahun 2001 - 2007

Tahun	Jumlah KSM	Saldo Piutang KSM (dalam Rupiah)
2001	71	351,425,350.00
2002	94	493,562,200.00
2003	152	517,234,622.00
2004	138	529,658,467.00
2005	160	542,919,467.00
2006	153	536,062,192.00
2007	187	576,743,404.00

(sumber: Laporan Keuangan BKM Bina Dharma Tahun 2001-2007)

Sampai dengan akhir Januari 2008, terdapat 48,7% kredit yang macet atau terdapat sebanyak 91 KSM dari 187 KSM yang pengembalian piutangnya macet. Sisanya sebanyak 36,9% atau sebanyak 69 KSM merupakan KSM yang dalam pengembalian piutangnya termasuk kategori lancar. Dalam kategori sedang atau kurang lancar terdapat 14,4% atau 27 KSM.

Tabel 1.2
Kriteria Kredit Pada BKM Bina Dharma
Sampai dengan Akhir Januari 2008

Keterangan	Jumlah KSM	%
Kredit Lancar	69	36.9
Kredit Kurang Lancar	27	14.4
Kredit Macet	91	48.7
JUMLAH	187	100

Dengan adanya masalah pengembalian piutang tersebut mengakibatkan penerimaan piutang yang kurang menggembarakan sehingga KSM ini pun berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Untuk penerimaan piutang setiap tahunnya mengalami penurunan ini dapat dilihat pada Tabel 1.3 dimana dari tahun 2004 hingga tahun 2007 terjadi penurunan jumlah pengembalian pinjaman (piutang) dari KSM.

Pada Tabel 1.3 menunjukkan adanya penurunan yang sangat mengkhawatirkan. Dari tahun ketahun, penerimaan piutang bukannya semakin meningkat malah semakin menurun. Dapat dilihat walaupun pada tahun 2002 dan 2003 mengalami peningkatan, namun pada tahun-tahun selanjutnya yaitu tahun 2004, 2005, 2006, 2007 terus mengalami penurunan yang sangat besar.

Tabel 1.3
Pengembalian Pinjaman KSM
Tahun 2001-2007

Tahun	Pokok Pinjaman (dalam Rupiah)	%	Ket
2001	245.847.207		
2002	335.782.150	36,58	Naik
2003	384.911.100	14,63	Naik
2004	338.276.155	12,11	Turun
2005	290.454.564	14,13	Turun
2006	251.978.161	13,24	Turun
2007	243.864.295	3,22	Turun

(sumber: Laporan Keuangan BKM Bina Dharma Tahun 2001-2007)

Dari penurunan pengembalian piutang ini, mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan atas jasa kredit. Pendapatan jasa kredit ini diperoleh dari jasa yang dikenakan kepada debitur atas kredit yang diberikan. Besarnya jasa ditetapkan sebesar 1,5% dari pokok pinjaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Pendapatan Jasa BKM Bina Dharma
Tahun 2001-2007

Tahun	Pendapatan Jasa	%	Ket
2001	69.181.400		
2002	76.662.400	10,76	Naik
2003	75.302.700	1,77	Turun
2004	68.002.425	9,69	Turun
2005	58.991.750	13,25	Turun
2006	51.655.375	12,43	Turun
2007	50.627.000	1,99	Turun

(sumber: Laporan Keuangan BKM Bina Dharma tahun 2001-2007)

Penerimaan piutang dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu oleh adanya piutang bermasalah. Beberapa faktor yang menyebabkan piutang menjadi bermasalah yaitu faktor risiko bisnis dan faktor non risiko bisnis. Faktor risiko bisnis dari sisi kreditur diantaranya: analisis piutang yang kurang akurat, pemantauan kredit yang buruk, skema kredit yang tidak tepat, verifikasi data keuangan dan jaminan yang sangat lemah. Dari sisi debitur dapat berupa kegagalan dalam pengelolaan manajemen dan usaha, pangsa pasar yang berubah-ubah, perubahan kondisi ekonomi dan moneter, serta perubahan kebijakan pemerintah.

Salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi pengembalian piutang dari debitur adalah keberhasilan usaha yang dikelola oleh debitur tersebut.

Piutang muncul dari adanya penjualan barang, penyerahan jasa atau juga karena adanya pemberian pinjaman dana (Henry Simamora 2000:228). Jadi dalam hal ini BKM pun memiliki piutang sebagaimana tadi pengertian piutang, piutang BKM Bina Dharma berasal dari pemberian pinjaman dana (pemberian kredit).

Kemacetan pengembalian piutang oleh KSM karena berbagai alasan diantaranya adalah keberhasilan usaha, menyebabkan penerimaan piutang pada BKM Bina Dharma mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui berapa besar keberhasilan usaha KSM yang dalam hal ini merupakan pihak peminjam (debitur) dapat mempengaruhi penerimaan piutang pada BKM Bina Dharma. Sehingga penulis mengambil judul skripsi “PENGARUH KEBERHASILAN USAHA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)

TERHADAP PENERIMAAN PIUTANG PADA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) BINA DHARMA DI KELURAHAN GARUDA KECAMATAN ANDIR KOTA BANDUNG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keberhasilan usaha KSM anggota BKM Bina Dharma
2. Bagaimana penerimaan piutang pada BKM Bina Dharma
3. Seberapa besar pengaruh keberhasilan usaha KSM terhadap penerimaan piutang pada BKM Bina Dharma

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi supaya dapat mengetahui berapa besar pengaruh keberhasilan usaha KSM terhadap penerimaan piutang pada BKM Bina Dharma.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui keberhasilan usaha KSM
2. untuk mengetahui perkembangan penerimaan piutang pada BKM Bina Dharma

3. untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keberhasilan usaha KSM terhadap penerimaan piutang pada BKM Bina Dharma

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya tentang keberhasilan usaha KSM serta penerimaan piutang sehingga dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut mengenai masalah masalah yang berkaitan dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menambah ilmu bagi peneliti khususnya tentang P2KP. Serta bagi pihak lembaga diharapkan akan menjadi bahan masukan dalam menjalankan kegiatan usahanya.